



PERHIMPUNAN PELAJAR
INDONESIA DI JERMAN
INDONESIA STUDENTS
ASSOCIATIONS IN GERMANY
VEREINIGUNG INDONESISCHER
STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V.
REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT BONN
REGISTERJAHR: 1963
REGISTERNUMMER: VR2912

KAJIAN DAN TUNTUTAN PPI JERMAN SAPTA ASA PELAJAR INDONESIA DI JERMAN

12 September 2025

Menyikapi dinamika ekonomi, sosial dan politik di Indonesia yang implikasinya dapat mempunyai dampak nyata terhadap segenap pelajar dan diaspora Indonesia di luar negeri, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, menyatakan sikap.

Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi rangkaian demonstrasi di berbagai daerah yang diwarnai tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum, penangkapan dan proses kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, penjarahan, serta perusakan fasilitas umum. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi kami, pelajar Indonesia di Jerman, baik terkait keselamatan keluarga/kerabat di tanah air maupun implikasinya pada iklim akademik serta masa depan kami yang ingin berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

Melalui gabungan inisiatif para figur publik tanah air, tersusun 17+8 tuntutan yang merangkum berbagai tuntutan masyarakat Indonesia untuk pemangku kepentingan. Poin-poin tuntutan tersebut telah dibuat secara komprehensif dan sederhana, agar dapat berfungsi sebagai bentuk kanalisasi amarah, kekecewaan, kegelisahan dan aspirasi publik terhadap situasi sosial ekonomi dan politik negara yang karut-marut.

Sebagai organisasi pelajar politis non-partisan, sosial dan akademis, PPI Jerman telah mengkaji poin tuntutan yang kami rangkum dalam ***Sapta Asa Pelajar Indonesia di Jerman***. Kajian ini kami sampaikan ke hadapan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Berlin beserta Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Atase Kepolisian, Atase Pertahanan, dan fungsionaris yang bertugas di KBRI Berlin.

Aksi massa belakangan ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari berbagai permasalahan struktural yang menimpa masyarakat Indonesia. Adapun faktor-faktor yang turut memupuk keresahan dan amarah publik adalah

1. **Ketidakpastian ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan sulitnya mencari pekerjaan.**
Populasi masyarakat di bawah garis kemiskinan tinggi, PHK lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun lalu, dan lulusan muda sulit mencari kerja. Daya beli masyarakat menurun, ekonomi semakin lesu. Hal ini diperparah dengan pelemahan mata uang Rupiah terhadap mata uang asing.
2. **Kekecewaan masyarakat terhadap hasil kinerja, perilaku, serta rencana pemerintah,** yang meliputi:
 - a. Kelangkaan gas LPJ, isu kualitas BBM Pertamina, dan volume minyak goreng rakyat yang tidak sesuai dengan bungkus kemasan.

- b. Rencana kenaikan PPN di akhir tahun 2024 hingga kenaikan PBB disproportional di beberapa daerah, akibat efisiensi anggaran yang dimandatkan oleh Presiden.
 - c. Pembekuan rekening inaktif.
 - d. Pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bahwa pemerintah berhak mencaplok tanah.
 - e. Istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang melancong ke luar negeri dan mengirimkan surat edaran ke enam KBRI dan satu KJRI di luar negeri untuk dilayani.
 - f. Dan lain-lain.
3. **Pengesahan revisi UU TNI** tanpa partisipasi publik dan minim transparansi, yang membuka ruang bagi prajurit aktif untuk dapat masuk ke ranah sipil.
4. **Kegiatan pertambangan, penggundulan hutan dan perusakan lingkungan** yang menjamur di penjuru negeri akibat keserakahan oligarki dan ambisi pemerintah telah mengganggu kelangsungan hidup masyarakat lokal dan adat, merusak ekosistem lingkungan, dan mempercepat perubahan iklim.
5. **Tunjangan perumahan untuk anggota DPR-RI.**
6. **Kekerasan aparat kepolisian dan kriminalisasi masyarakat sipil.**

Berdasarkan kondisi dan faktor-faktor pemicu yang telah kami paparkan di atas, PPI Jerman menyampaikan daftar **poin tuntutan** berikut untuk dijadikan agenda dialog yang jelas dan berorientasi pada perbaikan dengan:

- 1) **Reformasi DPR RI. Rombak penggajian dan tunjangan pejabat publik yang berkeadilan, transparan, serta akuntabel.**
 - **Evaluasi total kinerja dan anggaran DPR-RI.** Batalkan tunjangan perumahan dan tunjangan lain yang tidak esensial.
 - **Jamin keterbukaan, akuntabilitas dan transparansi gaji, tunjangan, insentif, dan sumber pemasukan lainnya** bagi anggota DPR.
 - **Pecat anggota legislatif yang tidak kompeten.**
 - **Moratorium perjalanan dinas bagi pejabat publik di Indonesia.**¹
- 2) **Reformasi total Kepolisian Nasional RI:**
 - **Usut tuntas kematian Affan Kurniawan** dan 10 masyarakat sipil lainnya dalam rentetan demonstrasi. Bentuk tim investigasi jika diperlukan.
 - **Bebaskan seluruh individu yang ditahan dan dikriminalisasi Polisi, serta hentikan tindakan represif terhadap masyarakat sipil.** Kepolisian RI telah membuktikan ketidakbecusannya dalam menjunjung tinggi keselamatan masyarakat sipil dalam rangkaian demonstrasi dan aksi massa.
 - Untuk setiap bentuk pelanggaran berat dalam tingkat komando perlu diterapkan mekanisme akuntabilitas kepemimpinan hingga level tertinggi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) **Evaluasi menyeluruh dan transparan atas program-program prioritas pemerintah** yang berbasis indikator kinerja, analisis manfaat-biaya, serta dampak sosial dan lingkungan. Meliputi, namun tidak terbatas pada Makan Bergizi Gratis (MBG); Koperasi Desa Merah Putih; Danantara; Hilirisasi industri nikel;

¹ Sikap PPI Jerman terhadap kunjungan kerja pejabat publik dirilis secara terpisah, terlampir.



PERHIMPUNAN PELAJAR
INDONESIA DI JERMAN
INDONESIA STUDENTS
ASSOCIATIONS IN GERMANY
VEREINIGUNG INDONESISCHER
STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V.
REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT BONN
REGISTERJAHR: 1963
REGISTERNUMMER: VR2912

Sekolah Rakyat; Food Estate; dan lain-lain.

Alihkan alokasi anggaran untuk pos pengeluaran yang lebih berdampak pada masyarakat, seperti peningkatan upah bagi tenaga pengajar dan dosen, pemerataan dana riset, beasiswa, dan batalkan pemotongan anggaran pendidikan tinggi.

- 4) **Hapus diskriminasi usia pada lapangan pekerjaan.**
 - **Tetapkan regulasi yang melarang berbagai bentuk diskriminasi usia pada lowongan pekerjaan.** Bentuk diskriminasi oleh pencipta lapangan pekerjaan pada usia pelamar menghalangi tenaga kerja muda dalam mencari pekerjaan yang layak.
 - Batas usia maksimum dalam melamar pekerjaan dapat menghambat peluang kerja bagi lulusan Indonesia di luar negeri, dengan itu berpotensi membatasi keterlibatan diaspora dalam pembangunan bangsa.
- 5) **Tindaklanjuti Naskah Akademik RUU Perlindungan Pelajar.** Sudah semestinya pelajar Indonesia di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri merupakan aset berharga bangsa. Kepergian M. Athaya Nasution merupakan pukulan telak bagi segenap pelajar Indonesia di Eropa, khususnya Belanda. Kami menuntut DPR-RI agar segera menindaklanjuti kajian RUU Perlindungan Pelajar yang telah dikaji dan disampaikan oleh PPI Dunia.
- 6) **Transparansi dan buka jalur komunikasi bagi pelajar dan diaspora Indonesia di luar negeri untuk dapat menyampaikan aspirasi.**
 - Buka jalur komunikasi perwakilan pemerintah RI di Jerman –KBRI Berlin, KJRI Frankfurt, KJRI Hamburg– untuk dapat mendengarkan aspirasi pelajar Indonesia di luar negeri secara terbuka.
 - Pengoptimalan kanal penyampaian aspirasi publik seperti melalui **Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR-RI** agar aspirasi masyarakat Indonesia dapat tersalurkan dengan baik. Dalam sistem kenegaraan demokratis, diperlukan tata kelola pemerintahan yang transparan dan proses demokrasi deliberatif partisipatif.
 - Buka jalur penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Komisi I DPR-RI, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 7) **Evaluasi menyeluruh dan kawal ketat implementasi UU TNI** untuk menjamin pemisahan tegas fungsi militer-sipil dan menjaga supremasi sipil dalam tata negara demokratis. Tarik mundur prajurit TNI dari pengamanan sipil, jabatan publik, badan K/L dan BUMN yang tidak termaktub dalam UU TNI.

Kajian dan tuntutan ini merupakan hasil kajian Pengurus Pusat PPI Jerman, dengan masukan dari PPI cabang di Jerman. Kami menuntut agar tuntutan-tuntutan kami dapat disalurkan dan diteruskan ke pihak-pihak berwenang.

Penyusun:

Muhammad Nur Ar Royyan Mas

Ketua Umum PPI Jerman 2024/2025

Hessel Juliust

Kepala Ad Hoc PPI Jerman 2024/2025



PERHIMPUNAN PELAJAR
INDONESIA DI JERMAN
INDONESIA STUDENTS
ASSOCIATIONS IN GERMANY
VEREINIGUNG INDONESISCHER
STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V.
REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT BONN
REGISTERJAHR: 1963
REGISTERNUMMER: VR2912

Daftar Pustaka

- detikEdu*,
<https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8103039/kronologi-meninggalnya-athaya-anggota-ppi-b-eland-saat-kunker-pejabat>.
- "Efisiensi anggaran Kemendikti Saintek diprotes mahasiswa dan dosen PTN – 'Kami khawatir dapat lumpuhkan proses pembelajaran.'" *BBC*, 28 February 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg116pz1glo>. Accessed 12 September 2025.
- "Indonesia: Authorities must investigate police killing of motorcycle taxi driver during protest in Jakarta • Amnesty International Indonesia." *Amnesty International Indonesia*, 29 August 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-authorities-must-investigate-police-killing-of-motorcycle-taxi-driver-during-protest-in-jakarta/08/2025/?> Accessed 12 September 2025.
- "Kata-kata Menteri UMKM Usai Viral Surat Kunjungan Istri ke Eropa." *detikNews*, 5 July 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7996796/kata-kata-menteri-umkm-usai-viral-surat-kunjungan-istri-ke-eropa>. Accessed 12 September 2025.
- "Kronologi Pernyataan Nusron Wahid soal Tanah Telantar | tempo.co." *Tempo.co*, 13 August 2025, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-pernyataan-nusron-wahid-soal-tanah-telantar-2058467>. Accessed 12 September 2025.
- "Kuartal I 2025: Elpiji 3 Kg Langka, BBM Pertamina Oplosan, hingga Minyak Kita Disunat | tempo.co." *Tempo.co*, 15 March 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/kuartal-i-2025-elpiji-3-kg-langka-bbm-pertamina-oplosan-hingga-minyak-kita-disunat--1219865>. Accessed 12 September 2025.
- "Laras Faizati Ditangkap Atas Tuduhan Penghasutan, Kuasa Hukum: Ditahan Tanpa Dimintai Klarifikasi | tempo.co." *Tempo.co*, 4 September 2025, <https://www.tempo.co/hukum/laras-faizati-ditangkap-atas-tuduhan-penghasutan-kuasa-hukum-ditahan-tanpa-dimintai-klarifikasi--2066545>. Accessed 12 September 2025.
- "Press Release RESET INDONESIA'S ECONOMY – CELIOS." *CELIOS*, 4 September 2025, <https://celios.co.id/siaran-pers-reset-ekonomi-indonesia/>. Accessed 12 September 2025.
- "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan." *PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, 18 May 2025, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1476/ppatk-hentikan-sementara-transaksi-rekening-dormant-untuk-lindungi-kepentingan-publik.html. Accessed 12 September 2025.
- "TLH 2025.cdr." *WALHI*, WALHI, 2025, <https://www.walhi.or.id/uploads/2024-Rilis/TLH%202025%20rev.pdf>. Accessed 12 September 2025.
- "UU TNI Disahkan, Kejagung Bisa Proses Prajurit di 14 Jabatan Sipil yang Terjerat Pidana | tempo.co." *Tempo.co*, 21 March 2025, <https://www.tempo.co/politik/uu-tni-disahkan-kejagung-bisa-proses-prajurit-di-14-jabatan-sipil-yang-terjerat-pidana-1222466>. Accessed 12 September 2025.



PERHIMPUNAN PELAJAR
INDONESIA DI JERMAN
INDONESIA STUDENTS
ASSOCIATIONS IN GERMANY
VEREINIGUNG INDONESISCHER
STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V.
REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT BONN
REGISTERJAHR: 1963
REGISTERNUMMER: VR2912

**PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI JERMAN
NOMOR: 576/VII/KET/PTN-PPIJ/202425/10092025
Perihal: PERNYATAAN SIKAP PPI JERMAN**

Dengan maraknya gelombang penolakan terhadap kunjungan pejabat publik ke luar negeri, terlebih setelah meninggalnya M. Athaya Helmi Nasution, anggota PPI Groningen, yang meninggal kala mendampingi rombongan DPR, OJK dan Bank Indonesia di Wina, Austria. PPI Jerman menyatakan bahwa

- 1) PPI Jerman **MENOLAK** kehadiran pejabat publik Indonesia – anggota legislatif, Menteri, Wakil Menteri, staf Kementerian, petinggi dan staf BUMN, petinggi dan staf lembaga kenegaraan, dan aparat sipil negara – di Jerman, **jika tanpa disertai dengan maksud dan tujuan dari kunjungan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.**
- 2) Mengimbuai bagi segenap mahasiswa dan pelajar Indonesia di Jerman untuk tidak menerima permintaan fasilitas perjalanan pejabat publik **tanpa disertai kontrak resmi dan mekanisme perlindungan hukum** yang memadai.
- 3) Mengimbuai seluruh mahasiswa dan pelajar Indonesia di Jerman agar memberikan informasi kepada PPI Jerman jika mendapat tawaran kerja dari pejabat publik Indonesia yang berencana datang ke Jerman dan sekitarnya. Hal ini agar dalam situasi darurat, PPI Jerman dapat mengusahakan untuk dapat mengerahkan bantuan.
- 4) Menuntut koordinasi dan transparansi KBRI Berlin, KJRI Frankfurt dan KJRI Hamburg dalam memastikan **tidak ada pelibatan mahasiswa dan pelajar Indonesia di Jerman dalam kunjungan pejabat publik tanpa berkoordinasi dengan PPI Jerman.**

Penting untuk dicatat, bahwa himbauan kami tidak ditujukan untuk membatasi pergerakan individu dan mata pencaharian sebagian pelajar serta mahasiswa di Jerman. Kami juga tidak bermaksud membatasi ruang gerak pejabat publik Indonesia yang perlu melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, jika memiliki maksud dan tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Melalui pernyataan sikap ini, kami mendukung penuh pernyataan sikap yang telah dirilis oleh PPI Belanda, menyikapi meninggalnya M. Athaya Helmi Nasution selama mendampingi rombongan pejabat DPR, OJK dan Bank Indonesia di Wina, Austria. **Kami menuntut tanggung jawab, keadilan dan transparansi dari KBRI Wina, KBRI Den Haag dan pihak penyelenggara perjalanan (EO) atas kejadian ini.**

Dengan ini kami juga mengharapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pelajar dapat segera digulirkan. Kami mengharapkan peran dari PPI Dunia agar dapat membantu menekan pemangku kepentingan di badan legislatif agar dapat menaruh perhatian ke perlindungan pelajar dan mahasiswa Indonesia di luar negeri.



PERHIMPUNAN PELAJAR
INDONESIA DI JERMAN
INDONESIA STUDENTS
ASSOCIATIONS IN GERMANY
VEREINIGUNG INDONESISCHER
STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V.
REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT BONN
REGISTERJAHR: 1963
REGISTERNUMMER: VR2912

PPI Jerman bertugas untuk menjadi garda terdepan atas perlindungan mahasiswa dan pelajar Indonesia di Jerman, serta memperjuangkan hak-hak mereka selama menempuh studi di Jerman. Kami mohon koordinasi yang lebih intensif antara KBRI, KJRI, PPI cabang dan segenap pelajar Indonesia di Jerman dalam masa mendatang mengenai keselamatan pelajar Indonesia di Jerman.

Kami dengan sepenuh hati menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya M. Athaya Helmi Nasution. Bersamaan dengan itu, kami menuntut adanya keadilan, pertanggungjawaban, serta pengusutan tuntas atas meninggalnya M. Athaya Helmi Nasution. Proses penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar kebenaran dapat terungkap dan keadilan benar-benar ditegakkan.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan.

Dengan hormat,

Muhammad Nur Ar Royyan Mas
Ketua Umum PPI Jerman

Muhammad Taqiyuddin Ar Rofi
Sekretaris Jenderal PPI Jerman



PERHIMPUNAN PELAJAR
INDONESIA DI JERMAN
INDONESIA STUDENTS
ASSOCIATIONS IN GERMANY
VEREINIGUNG INDONESISCHER
STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V.

REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT BONN
REGISTERJAHR: 1963
REGISTERNUMMER: VR2912

Ikut menandatangani:

1. PPI Bonn
2. PPI Dresden
3. PPI Stuttgart
4. PPI Hamburg
5. PPI Chemnitz
6. PPI Clausthal
7. PPI Leipzig
8. PPI Kiel
9. PPI Frada
10. PPI Karlsruhe
11. PPI Freiburg
12. PPI Halle
13. PPI Bochum Dortmund
14. PPI Giessen
15. PPI Münster
16. PPI Hannover
17. PPI Aachen
18. PPI Munich
19. PPI Rostock
20. PPI BerBrand
21. PPI Göttingen
22. PPI Braunschweig